

EVALUASI PROGRAM GURU GARIS DEPAN TERHADAP KUALITAS GURU SEKOLAH DASAR DI DAERAH 3T

Emy Yunita Rahma Pratiwi^{1*}, Suryanti², Wiryanto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya

¹emy.21013@mhs.unesa.ac.id

Abstract

School located in a remote areas has a complex educational problems such as limited teachers, inadequate building conditions, difficult road access and even lack of textbooks. This study aims to obtain an overview of the implementation of the Frontline Teacher (GGD) program and decentralization of education at SDN Pojok Klitih 3, Jombang, East Java. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through the interview process (online) and documentations. The data analysis technique used is data triangulation, which is to compare the findings using different methods in answering the same question. Data and information in the form of interviews, documentation studies and document analysis related to the GGD program policies are processed and presented descriptively. With the GGD program, it is hoped that it will be able to help the nation's candidates and be able to develop the quality of education, especially in the Jombang area, although the distribution of GGD has not been comprehensive. The implementation of decentralization of education at SDN Pojok Klitih 3, Jombang, East Java is said to be quite good, the democratization of schools is running according to procedures. This is due to the lack of infrastructure, funds and also lack of supportive knowledge. The professionalism of teachers at SDN Pojok Klitih 3, Jombang, East Java can be said to be good, this can be seen from the four competencies possessed by teachers, namely pedagogic, personality, professional and social competencies. The decentralization of education to the professionalism of SDN Pojok Klitih 3, Jombang, East Java has not been maximized. This can be due to the need to be motivated, valued and prospered as well as adequate infrastructure to improve the quality of education.

Keywords: 3T regions; decentralization; frontline teachers (ggd); teacher quality

Abstrak

Sekolah yang berada di daerah terpencil mempunyai masalah pendidikan yang kompleks, seperti terbatasnya tenaga guru, kondisi gedung tidak layak, akses jalan yang sulit bahkan kekurangan buku pelajaran. Riset ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program Guru Garis Depan (GGD) serta desentralisasi pendidikan di SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan metode daring, dokumen serta studi dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik triangulasi data, yaitu membandingkan antara hasil kajian melalui berbagai teknik untuk mencari jawaban atas permasalahan sejenis. Penyajian data merupakan hasil wawancara, dokumentasi, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan program GGD melalui penyajian deskriptif pada hasilnya. Melalui GGD sangat diharapkan bisa memberikan bantuan kepada SDM berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada daerah Jombang meskipun ternyata belum merata. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur dikatakan cukup baik, demokratisasi sekolah berjalan sesuai prosedur. Diakibatkan masih kekurangan fasilitas serta pendanaan. Profesionalitas guru SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur dapat dikatakan baik, ini terlihat berdasarkan beberapa kompetensi seperti personalitas, pedagogik, keprofesionalan serta kemasyarakatan. Desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur belum maksimal. Hal ini dapat berdasarkan kebutuhan diberikan motivasi, penghargaan, serta kesejahteraan melalui fasilitas yang mencukupi.

Kata Kunci: daerah 3T; desentralisasi; guru garis depan (GGD); kualitas guru

Received : 2022-05-31

Approved : 2022-07-21

Revised : 2022-07-19

Published : 2022-07-31



Jurnal Cakrawala Pendas is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kesuksesan penerapan kebijakan dapat dinilai berdasarkan tujuan yang akan dicapai, sebagaimana penerapan kebijakan strategi tentang Guru Garis Depan (GGD) dari pemerintah dengan target untuk menambah mutu pendidikan dasar. Masih terdapat berbagai permasalahan terkait pendidikan Indonesia, mulai dari akses serta mutu yang belum merata terkait pengajar. Keadaan tersebut dapat dibuktikan dari masih kurangnya kualitas lulusan serta relevansi pendidikannya terhadap kebutuhan secara sosial (Rivalina, 2016). Meskipun kuantitas guru bisa dibbilang banyak, namun tidak disertai pemerataan dalam distribusi guru hingga pelosok negeri. Sehingga meskipun dari jumlahnya sudah memadai, akan tetapi masih kurang merata penyebarannya, terutama pada daerah yang jauh dari kota. Begitu juga untuk daerah berkarakteristik 3T, yakni daerah Tertinggal, Terluar serta Terdepan (Sukarni, 2021).

Secara sosiokultural dan geografis, seluruh wilayah NKRI dikategorikan negara yang cukup luas serta beragam dalam kemasyarakatan bahkan kulturnya sehingga membutuhkan usaha yang maksimal untuk mengentaskan persoalan yang ada, terutama berkaitan dengan pendidikan kepada wilayah 3T tersebut. Persoalan yang terjadi berkaitan dengan kualitas pengajar serta kuantitasnya yang masih kurang karena pendistribusian masih tidak merata. Ditemukan juga guru dengan kualitas yang masih dibawah kualifikasi yang ditentukan, kurang kompetensinya, serta riwayat pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu masih sering tidak relevan. Berkaitan dengan institusi pendidikan banyak sekolah yang berpartisipasi rendah, kekurangan fasilitas belajar hingga infrastruktur tidak layak, menyebabkan akses menuju institusi pendidikan menjadi terbatas. Sehingga daerah 3T sebagai cakupan wilayah NKRI harus mendapatkan perhatian agar kualitas pendidikan disana bisa ditingkatkan sebagaimana wilayah lainnya (Danga, 2018).

Hasil riset kualitatif di berbagai sekolah terpencil mengindikasikan bahwa kuantitas guru honorer pada tingkat SD serta SMP tercatat sudah meraih angka 60% berdasarkan minimum RSG 1:35, hasil ini masih jauh dibandingkan wilayah kota yang dapat meraih angka Rasio Siswa Guru (RSG) 1:14 (Andina & Arifa, 2021). Masih tidak meratanya distribusi serta kuantitas guru di seluruh penjuru Indonesia merupakan permasalahan utama yang terjadi sehingga bisa berdampak pada upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Pemerintah harus mampu menambah angka RSG serta menempatkan guru berkualitas secara merata sehingga terbentuk pengelolaan (redistribusi) optimal dalam pendidikan. Banyak cara dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya ialah melalui manajemen sekolah sehingga dapat membantu dikelolanya pelaksanaan pendidikan secara berkualitas (Patras et al., 2019). Untuk mampu meratakan pendidikan, wajib dilaksanakan secara komprehensif serta adil, dianalisis berdasarkan kebutuhan maupun kompetensi tiap daerah. Begitu juga dengan pemimpin daerah yang harus mampu ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan (Idrus, 2012).

Seiring diberlakukannya otonomi pendidikan, maka diperoleh kebebasan tiap lembaga pendidikan dalam mengatur kualitas pendidikan serta berhak untuk memaksimalkan kualitas SDM mereka. Melalui otonomi yang diberikan maka semua sekolah bisa mengaplikasikan strategi mereka dengan baik. Sehingga kinerja bisa ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan menambah daya produksi, daya kreasi bahkan efisiensinya (Hanafi, 2017). Dalam penerapannya, diperlukan adanya pelibatan seluruh pihak dalam pendidikan baik langsung maupun dengan perantara. Keoptimalan sekolah harus melalui berbagai tahapan yang komprehensif untuk membagi tanggung jawab diantara para pelaksana sehingga dapat mencapai desentralisasi yang maksimal dalam pendidikan dasar.

Disebutkan bahwa desentralisasi pendidikan ialah prosedur kompleks namun bisa menjadi jalan untuk mencapai perubahan mengenai penerapan sistem untuk menghasilkan kebijakan dan strategi optimal pada pendidikan, mendapatkan dana, SDM berkualitas, pelatihan pengajar, penyusunan kurikulum secara efektif dan manajemen lembaga (Surya et al., 2021). Kesuksesan ataupun kegagalan dalam desentralisasi ini kerap ditentukan berdasarkan berbagai alasan politis dalam teknisnya. Terdapat berbagai variasi pada program ini yang tidak saja menyangkut masalah pendidikan, namun juga terkait keuangan serta administrasinya. (Ervannudin & Widodo, 2016). Di sisi lain, pendidikan juga mempunyai kaitan terhadap strategi politik, sehingga seluruh usaha untuk menentukan kebijakan sangat dibutuhkan. Apabila disepakati gagasan mengenai pembuatan rancangan pendidikan harus diawali melalui identifikasi terhadap berbagai keperluan semua pihak secara personal ataupun berkelompok (Misya & Asrida, 2017).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penggunaan manajemen berbasis sekolah bisa membantu dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan agar lebih bermutu (Patras et al., 2019). Penelitian (Sumual & Ali, 2017) menyatakan jika semakin lama pengalaman mengajar, kompetensi pedagogik guru semakin berkurang, kualitas pendidik yang berpengalaman mengajar belum menjamin kualitas mumpuni dalam pelaksanaan pengajaran yang sering terjadi di daerah terpencil. Hasil penelitian dari (Firdaus et al., 2018) menyimpulkan bahwa kualitas tenaga pendidik masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan siswa, sarana dan prasarana belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar. Keberadaan fakta-fakta ini menunjukkan jika ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaan sistem pendidikan, dapat dilihat dari dukungan politis dalam perumusan tujuan pendidikan, pendanaan pendidikan dan organisasi politis pendidik seperti mempersiapkan guru profesional, sarana persiapan, inkonsistensi antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan juga antara tujuan dan model evaluasi pendidikan yang digunakan.

Tujuan dari riset ini adalah sebagai usaha evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan agar memperoleh informasi dari hasil rekomendasi program Guru Garis Depan, sehingga mampu mempercepat pemerataan pendidikan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T, terutama pada SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur.

Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni memaparkan strategi penerapan GDG dalam peningkatan mutu pengajar di SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur. Merujuk pendapat (Sukmadinata, 2017) menjelaskan yaitu riset kualitatif berkaitan dengan korelasi maupun pengalaman sosial sehingga peneliti meyakini hal tersebut sebagai bentuk konstruksi sosial. Secara personal ataupun kelompok kemudian memaknai suatu fenomena, prosedur maupun objek yang terkait dengan keadaan sesungguhnya untuk menggambarkan suatu kejadian sosial sehingga mengakibatkan timbulnya pandangan partisipan mengenai fenomena tersebut. Adapun data dikumpulkan dengan teknik wawancara melalui daring, serta dilakukan dokumentasi pada pelaksanaannya. Dari hasil tersebut, peneliti mencoba mengerti kondisi sosial dengan komprehensif, mendapatkan teori yang sejalan terhadap data lapangan, kemudian akan dibahas dengan referensi baik berupa buku-buku, jurnal, disertasi dan lain-lain. Kajian kualitatif selalu berkaitan dengan peristiwa tertentu beserta pihak yang terlibat. Untuk subjek di wawancarai, yaitu kepada sekolah, para guru dan staf. Dari hasil tersebut, peneliti mencoba mengerti kondisi sosial secara komprehensif, mendapatkan teori yang sejalan terhadap data lapangan, kemudian akan dibahas dengan referensi baik berupa

buku-buku, jurnal, disertasi dan lain-lain. Penelitian kualitatif selalu berkaitan dengan peristiwa tertentu beserta pihak yang terlibat.

Peneliti menerapkan teknik analisis data model triangulasi yakni hasil temuan akan dibandingkan dengan metode berbeda dalam rangka menemukan jawaban pertanyaan sejenis (Wirawan, 2016). Hasil wawancara dan analisis dokumen terkait strategi pelaksanaan GGD selanjutnya daianlisa serta disajikan dalam deksirpsi dan penjelasan berdasarkan metode (Miles, Huberman & Saldana, 2017). Adapun prosesnya ialah, *Pertama*, reduksi data berfungsi menelaah secara menyeluruh data dihimpun sehingga inti permasalahan bisa ditemukan dari kajian. *Kedua*, penyajian data ini kemudian diringkas secara rapi dan tersusun mengakibatkan pembahasan bisa diketahui serta dipahami secara mudah. *Ketiga*, konklusi, merupakan bagian dalam untuk menentukan hasil setelah kedua tahapan sebelumnya dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Guru Garis Depan (GGD) di SDN Pojok Klitih 3 Jombang

Perkembangan mutu pendidikan di daerah Jombang di hambat oleh beberapa faktor, diantaranya adalah fasilitas gedung yang terbatas, pemikiran masyarakat yang masih primitif terkait pendidikan, orang tua siswa itu sendiri, kondisi ekonomi keluarga dan keterbatasan mitra ketenagakerjaan sekolah. Adanya program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) yang telah mengikuti suatu Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta terpenuhinya beberapa persyaratan lainnya, diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah Jombang agar para peserta didik bisa segera mendapatkan fasilitator yang mampu mendukung. Peran potensial dan optimalisasi GGD dalam membantu mengelola dan mengembangkan sekolah tempat bertugas menjadi berkaitan dengan kepala sekolah, guru mitra, peserta didik, orangtua/masyarakat, dan sesama GGD. Hasil wawancara dengan pihak kepala sekolah, Guru Garis Depan di SDN Pojok Klitih 3 Jombang Jawa Timur menyatakan bahwa: *Pertama*, semua GGD belum mendapatkan fasilitas akomodasi yang dekat dengan sekolah sebagai lokasi bertugas. *Kedua*, program pembinaan kompetensi GGD belum didapatkan. *Ketiga*, masih terdapat GGD yang tidak menguasai materi muatan lokal. *Keempat*, tidak optimalnya GGD melaksanakan pembinaan ke masyarakat.

Dengan pelaksanaan program ini, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan guru-guru GGD dapat membantu pemerintah dalam program percepatan pembangunan khususnya daerah pinggiran Indonesia dan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan terhadap pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Program GGD telah dilaksanakan sebanyak dua tahap dan telah mendistribusikan ribuan guru profesional ke berbagai pelosok yang termasuk dalam kategori daerah-daerah 3T. Pada pelaksanaan program GGD, salah satu daerah sarannya berada di Jombang, Provinsi Jawa Timur. Seiring dengan implementasi di Kabupaten Jombang, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan program tersebut baik dari sisi penempatan/distribusi, pola komunikasi yang terputus, komitmen pelaksanaan dari pemerintah daerah sasaran, kurangnya fasilitas penunjang dan masalah penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan daerah khusus bagi guru-guru GGD tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, beberapa contoh permasalahan yang terjadi ialah sebagai berikut: 1) Tidak terlaksananya proses transmisi komunikasi yang efektif sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari pihak pengelola pendidikan di tingkat kecamatan, kepala sekolah serta masyarakat sekitar sekolah terhadap pelaksanaan program GGD di Kabupaten Jombang. 2) Terjadinya kecemburuan sosial dari guru honorer pada sekolah-

sekolah sasaran di Kabupaten Jombang yang merasa tidak diperhatikan nasibnya oleh pemerintah. 3) Penempatan guru GGD pada satuan pendidikan secara jumlah (kuantitas) guru telah mencukupi. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya sedikit konflik antara guru program GGD dengan guru honorer yang sudah mengajar sebelumnya di sekolah tersebut. 5) Ada salah seorang guru program GGD Kabupaten Jombang yang masih bermasalah dengan pencantuman Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada sistem pusat Data Pokok Pendidikan. Hal tersebut kemudian menghambat penerimaan hak mereka dalam mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan daerah khusus.

Diperlukan adanya pelayanan khusus akses ke daerah-daerah terpencil melalui pendidikan non-formal, seperti guru kunjung, mobil pintar, perpustakaan keliling, sekolah satu atap, sekolah berasrama, kelas berjalan, kelas kecil serta bentuk-bentuk lain pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan warga belajar yang belum bisa menjangkau sampai daerah 3T. Apabila pembelajaran dan penyusunan kurikulum selama ini berorientasi pada kelas-kelas reguler, maka pendidikan di daerah 3T perlu diambil sebuah kebijakan kurikulum baru mengarah pada kecakapan hidup (*life skill*) yang dapat dijadikan sebagai mata percaharian pokok peserta didik setelah tamat. Muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi moral *reasoning*, *feeling*, serta *behaviour*. Model ini merupakan salah satu alternatif untuk melayani pendidikan yang tidak terjangkau., memberikan porsi penguatan pada *life skill* dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, sehingga mereka dapat menghasilkan sumber daya manusia profesional dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia.

Profesionalitas dan Kompetensi Guru

Merujuk atas pendapat (Usman, 2002), profesionalitas diartikan keahlian pada diri seseorang terhadap kinerjanya dan memerlukan ilmu lain untuk dipelajari serta di implementasikan demi kepentingan banyak orang. Berlandaskan pernyataan dari (Danim, 2002), didefinisikan sikap setiap profesi untuk berkomitmen dalam mengembangkan kemampuannya dan mampu memberdayakan tehnik yang diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme tugas. Didasarkan atas mutu dan kualitas seseorang menjalankan kewajibannya tidak hanya terikat pada kompetensi melainkan atas sikap, keterampilan, kemampuan dan mempunyai keahlian khusus.

Secara etimologi, kompetensi berasal dari kata "*competence*" bermakna kemampuan atau kecakapan. Sedangkan merujuk pada pendapat (Sartono, 2002), kompetensi ialah sekelompok perilaku bertanggungjawab serta cerdas yang seseorang harus miliki karena menjadi aspek yang penting untuk disebut mampu menjalankan tugas maupun pekerjaan. Cakupan dalam kompetensi yakni segala syarat yang dibutuhkan pada pelaksanaan maupun pengaturan tugas yang bervariasi, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya termasuk dalam kerjasama yang dilakukan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, dijelaskan kompetensi sebagai seperangkat ilmu, kemampuan serta sikap dari seseorang untuk mencapai tingkat profesional pada pekerjaannya.

Guru diharuskan berkompeten dalam mendidik dan mengajar siswanya sehingga bisa menentukan kesuksesan program belajar. Terkait dengan pengajaran, kompetensi berguna untuk menilai keprofesionalan pengajar, yakni terkait kemampuan mereka serta pengetahuan yang dimiliki. (Sudjana, 2002) mengatakan kompetensi guru ialah kecakapan dasar dari setiap pengajar, bisa didapatkan dengan mengikuti pelatihan, pendidikan maupun pengalaman sesuai kualifikasi untuk diraih. Cakupan dari kompetensi guru secara umum yakni (1) pemahaman

bidang studi secara mendalam, (2) penguasaan tentang psikologis siswa, (3) pemahaman metode pendidikan, serta (4) peningkatan wawasan serta profesionalitas.

Terdapat standar pendidikan secara nasional tercantum pada PP RI No. 19 Tahun 2005 bahwa guru harus mempunyai kompetensi berikut: 1) Pedagogik, berkaitan dengan kecakapan dalam mengelola kegiatan belajar siswa terkait pemahaman, aplikasi serta penilaian hasil belajar maupun kemamoyan siswa untuk pengaktualisasian diri berdasarkan potensinya. 2) Kepribadian, merupakan kecakapan pengajar secara personalitas yaitu bersikap dewasa, mampu mengendalikan emosi, bijaksana maupun sikap tauladan lainnya untuk dilakukan. 3) Profesional, merupakan kecakapan seseorang terhadap bidangnya atau materi yang dipelajari secara komprehensif sehingga menungkinkan siswa bisa mencapai standar yang ditentukan dalam tingkat kompetensi secara nasional. 4) Sosial, berkaitan dengan kecakapan pengajar sebagai bagian kelompok sosial untuk menjalankan komunikasi dengan baik kepada siswa, sesama guru, wali siswa bahkan seluruh masyarakat. Seluruh kompetensi yang disebutkan harus mampu saling berkoneksi sehingga menyatu dalam kepribadian seorang pengajar. Agar guru memiliki keterampilan mengajar, harus juga disertai dengan akhlak dan kepribadian baik.

Implikasi Desentralisasi Pendidikan

Pada proses desentralisasi pendidikan, guru mempunyai peranan lebih dalam mempersiapkan pengajaran bagi siswa disebabkan guru bukan saja sebagai pemberi motivasi, akan tetapi juga memberikan fasilitas kepada siswanya. Kemampuan desain program belajar harus dimiliki guru sehingga mampu mendorong kreatifitas siswa secara keseluruhan dan mengakomodir keperluan mereka. Berbagai peranan tenaga pendidik tersebut berkonsekuensi yaitu guru diharuskan memiliki kreatifitas dan ide tinggi, diperkuat oleh terpenuhinya berbagai fasilitas yang dibutuhkan walaupun tidak mahal namun bisa dikembangkan, mempunyai kesabaran, ketelatenan, bersifat adil serta bijaksana untuk menilai hasil pembelajaran siswa, memberikan akomodasi terhadap perbedaan pandangan serta partisipasi siswa secara demokratis. Melalui desentralisasi, maka guru memerlukan waktu lebih banyak, serta tenaga dan pemikiran yang didukung oleh fasilitas memadai dari lembaga pendidikan.

Di sisi lain, para siswa harus bisa diberikan motivasi agar selalu aktif serta berusaha yang terbaik untuk pendidikannya serta memperoleh pengalaman untuk masa depan. Terdapat peluang bagi setiap pengajar untuk berkreasi dan berinovasi pada pelaksanaan proses belajar-mengajar sebagai usaha maksimal untuk menambah kualitas dalam pembelajaran serta hasil siswa, bahkan juga memberikan peluang semua masyarakat berpartisipasi aktif. Menurut Ibu Hidayah, S.Pd (Guru SDN Pojok Klitih 3, Jombang) “*Desentralisasi pendidikan adalah tindakan mencegah terjadinya korupsi di berbagai bidang, bahkan juga sikap kolusi serta nepotisme. Melalui pelibatan berbagai kalangan untuk mengawasi, menentukan kebijakan yang mencakup peranan guru hingga semua masyarakat, terdapatnya sikap tanggung jawab serta transparansi maka dapat dicegah berbagai upaya korupsi seperti anggaran bocor, pengeluaran proyek yang ditambah, melakukan rekrutmen pegawai tanpa prosedur yang sesuai sehingga menyebabkan dipekerjakannya SDM yang kurang kompeten, terjadinya penyelewengan dalam menggunakan kekuasaan karena mementingkan keperluan pribadi daripada lembaga*”.

Sehingga dalam menciptakan sistem profesional pada berbagai bidang, tidak cukup hanya dengan kesadaran serta perilaku baik, akan tetapi dibutuhkan pembiasaan pada seluruh kalangan dan melaksanakan kebijakan serta penyesuaiannya. Tentu saja pada awal pelaksanaannya akan terasa berat sehingga diperlukan adanya tekad kuat serta kerja keras seluruh kalangan pendidikan, dari guru hingga satuan pemerintahan secara berkelanjutan

mendukung kinerja nyata terkait dengan program anggaran serta fasilitas dan memberikan penghargaan optimal untuk seluruh pihak pelaksana pendidikan. Maka dari hal tersebut akan timbul kepercayaan semua pekerja pendidikan terutama pengajar bahwa kondisi pendidikan yang lebih maju bisa diwujudkan asalkan selalu optimis dan bekerjasama, maka pendidikan dapat lebih berkualitas sesuai yang diharapkan bersama. Dibutuhkan adanya kompetensi pada setiap pengajar dalam penerapan desentralisasi bidang pendidikan sehingga bisa memperkuat pelaksanaannya. Akan tetapi masih kurang berkembang profesionalitas pengajar pada saat ini sehingga diharapkan bisa meningkat dari segi wawasan, daya kreasi, serta inovasi pada pembelajaran.

Tingkat profesionalisme para pengajar melalui berbagai sistem yang digunakan di bidang pendidikan pastinya akan mengharapkan keadaan optimal untuk para siswa saat menjalankan kegiatan pembelajaran terutama di sekolah. Akan tetapi masih menjadi permasalahan yaitu setiap guru tidak mempunyai profesionalitas yang mampu diwujudkan, ditingkatkan maupun dijaga pada sistem pendidikan dimana pendidik melaksanakan tugasnya. Banyak dari pengajar masih kurang motivasinya untuk melakukan pengembangan diri disebabkan perhatian yang kurang dari pimpinan maupun pemerintah terhadap pemberian upah maupun hadiah atas suatu prestasi. Sehingga walaupun pengajar bisa mendesain berbagai metode pembelajaran seperti yang diinginkan pada penerapan desentralisasi, namun pendidik masih kurang mendapatkan dukungan, fasilitas memadai serta dana yang cukup. Menyebabkan guru tidak optimal dalam melaksanakan tugas. Maka dapat disimpulkan bahwa terkait kompetensi guru pada pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dinyatakan berbagai responden pada riset, semua kalangan pengajar berstatus PNS maupun honorer berdasarkan masa kerja yang lama, mereka mempunyai kesadaran bersama akan profesi mereka sebagai tenaga pendidik.

Kesimpulan

Diperlukan adanya optimalisasi pada pelaksanaan GGD sehingga sekolah mampu menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai GGD pada sekolah maupun lembaga pendidikan yang bisa dilaksanakan dengan peningkatan peranan berbagai pihak seperti kepala sekolah, staf pengajar, para siswa, orang tua bahkan masyarakat secara umum. Dalam rangka mewujudkan iklim yang memotivasi peranan GGD secara optimal dan menyeluruh sebaiknya kepala sekolah harus memberikan berbagai kebijakan yang efektif dalam internal. Melalui diterapkannya program GGD maka diharapkan bisa memotivasi dan meningkatkan kualitas setiap aparatur pendidikan terutama pada wilayah Jombang meskipun masih belum merata penyerbaran dari GGD yang diprogramkan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur dikatakan cukup baik, demokratisasi sekolah berjalan sesuai prosedur. Kondisi tersebut diakibatkan fasilitas yang masih kurang, dana serta kecakapan masih dibawah standar. Profesionalitas guru SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur bisa dilaksanakan secara optimal, apabila dinilai berdasarkan kompetensi setiap guru mencakup profesionalitas, pedagogik, sosial hingga kepribadian. Desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas SDN Pojok Klitih 3, Jombang, Jawa Timur belum maksimal.

Daftar Pustaka

- Akmalia, H. A., Indraswati, D., & Polonia, B. S. E. (2021). Pendampingan Pembelajaran Daerah Terpencil di SD Negeri 1 Tumbang Kuling Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(2), 243–252.

<https://doi.org/10.29407/ja.v5i2.15267>

- Andina, E., & Arifa, F. N. (2021). Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 85–105. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2101>
- Danga, S. R. Y. (2018). Guru Garis Depan (GGD); Membangun Sumba Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan. *SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD*, 2(1), 234–240.
- Danim, S. (2002). *Usaha Meningkatkan Profesionalisme Guru dan Inovasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamarah, S. H. (2005). *Interaksi Pendidik serta Siswanya pada Pelaksanaan Pembelajaran* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ervannudin, N., & Widodo, B. W. (2016). Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 147–172. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.866>
- Firdaus, Sulfasyah, & Nur, H. (2018). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil dibandingkan dengan negara lainnya . Tidak hanya itu , di Indonesia juga terdapat perbedaan. *Journal Sociology of Education*, 6(1), 33–43.
- Fitriyani, Sudjanto, B., Suryadi, & Matin. (2020). Objectives and Goals Policy of Guru Garis Depan Program To Improve the Basic Education Quality. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 383–397. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v12i2.262>
- Hanafi, M. (2017). Membangun Profesionalisme Guru Dalam Bingkai Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmu Bidaya*, 5(1), 35–45.
- Idrus, M. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah [Quality of Education and Equitable Education in Regions]. *Psikopedagogia*, 1(2), 1–10.
- Milles, M. B. A., Huberman, M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcsbook*. Los Angeles-London: Sage, 10.
- Misya, M. V. S., & Asrida, W. (2017). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jom Fisip*, 4(1), 1–13.
- Patras, Y. E., Papat, & Rahman, Y. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 7(2), 800–807.
- Rivalina, R. (2016). Peran Guru Garis Depan Dalam Mengembangkan Sekolah Efektif. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 30(2), 77–86.
- Sukarni, W. (2021). Literatur Review: Sistem Sosial Model Pembelajaran Problem Solving Terhadap Sikap Sosial Siswa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 106–115. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1102>
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumual, M. Z. I., & Ali, M. (2017). Evaluation of Primary School Teachers' Competence in

Implementing 2013 Curriculum: A Study in Tomohon City. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 11(3), 343–350. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v11i3.6429>

Surya, I., Budiman, Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121>